

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan hasil data wawancara dan observasi yang telah peneliti laksanakan di Dinas Pendidikan Kota Jambi bersama dengan 7 orang informan tentang studi fenomenologi manajemen anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan Anggaran Pendidikan Kota Jambi sudah sesuai dengan Pedoman penyusunan anggaran Pemerintah Kota Jambi yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan Surat Edaran dari Walikota Jambi setiap tahunnya. Walaupun ada rangkaian prosedur Musrembang dengan stakeholder yang tidak ada dilakukan yakni dengan Pengawas Pendidikan Kota Jambi.
2. Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pendidikan Kota Jambi secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran Dinas Pendidikan selalu di atas 85%, walaupun ada penurunan selama tiga tahun terakhir, yakni 97%, 91% dan 87%. Penurunan ini terjadi bukan karena tidak terlaksana semua kegiatan, namun karena adanya SiLPA yang mengendap sejak tahun 2018 karena terkendala dengan regulasi yang ada. Sampai saat ini belum ada solusi dari Kementerian Pendidikan.

3. Kendala dalam serapan anggaran pendidikan Kota Jambi adalah sering terjadi keterlambatan dalam realisasi anggaran khususnya untuk anggaran dari pusat (DAK dan DAU) karena juknis sering datang terlambat. Disamping terlambat juga sering terjadi perubahan juknis di tengah tahun anggaran. Kendala regulasi yang ada yang menyebabkan Dinas Pendidikan Kota Jambi tidak bisa mencapai realisasi 100%, walaupun semua kegiatan terlaksana.
4. Proses evaluasi dan pengawasan selalu dilaksanakan secara berkala. Pengawasan dari Internal yang dilakukan oleh Bidang yang memiliki program kegiatan tersebut, dan pengawas dari luar Dinas yakni pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dari inspektorat secara berkala, biasanya per tiga bulan. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendidikan Kota Jambi terdiri dari : laporan bulanan yang disampaikan ke BPKAD Kota Jambi dan dilakukan sinkronisasi serta laporan pertanggungjawaban tahunan ke BPKAD Kota Jambi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Alokasi Anggaran Pendidikan Kota Jambi paling banyak adalah untuk alokasi gaji guru dan tenaga kependidikan, serta Dana BOS. Semua Anggaran tersebut langsung masuk ke rekening guru dan tenaga kependidikan serta dana BOS langsung masuk ke rekening sekolah. Dinas Pendidikan fokus kepada pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dan laporan yang sering terkendala adalah lambatnya laporan realisasi dana BOS dari semua sekolah.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang terpapar diatas, beberapa poin saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana anggaran pendidikan Kota Jambi seperti pengawas pendidikan, Pimpinan Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah (MKKS).
2. Perlu ditingkatkan Anggaran Belanja Modal Dinas Pendidikan Kota Jambi, khususnya untuk kegiatan peningkatan jumlah dan kualitas Guru dan tenaga kependidikan.
3. Perlu terus mendesak Kementerian Pendidikan agar ada perubahan regulasi untuk anggaran yang mengendap dan menjadi silpa setiap tahunnya.
4. Perlu dilaksanakan pelatihan secara berkala tentang pembuatan pelaporan realisasi anggaran agar sesuai dengan hasil pertanggungjawaban yang diharapkan.